

MODEL EVALUASI MANAJEMEN KEUANGAN USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) DI KOTA PEKANBARU

RM Riadi¹⁾, Gusnardi²⁾, dan Fenny Trisnawati³⁾

^{1,2,3}Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

^{1,2,3}Jln. HR Soebrantas Km 12,5, Pekanbaru, 28293

E-mail: rm.riadi@lecturer.unri.ac.id¹⁾, gusnardi@lecturer.unri.ac.id²⁾, fenny.trisnawati@lecturer.unri.ac.id³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model evaluasi UEK-SP sebagai bahan keputusan pendeteksian kesehatan dan mengindikasikan terjadinya penyimpangan dan tunggakan di 58 kelurahan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kesesuaian analisis kesehatan koperasi. Berdasarkan paparan tersebut peneliti membuat evaluasi manajemen keuangan UEK-SP di Kota Pekanbaru dengan mengadopsi Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Menurut model evaluasi manajemen keuangan UEK-SP, hasil penghitungan analisis model evaluasi yaitu diketahui perbandingan antara modal sendiri terhadap total asset, perbandingan modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan, hasil analisis data dan penghitungan untuk cadangan modal terhadap pinjaman yang diberikan, cadangan modal terhadap pinjaman yang bermasalah, efisiensi yang terdiri dari yang terdiri dari beban usaha terhadap SHU, perbandingan biaya karyawan terhadap SHU, rasio likuiditas, rasio kemandirian dan pertumbuhan yang terdiri dari Perbandingan SHU terhadap Total Aset, perbandingan SHU terhadap modal sendiri. Secara umum, hasil model evaluasi manajemen keuangan UEK-SP diperoleh penghitungan dengan kondisi "Dalam Pengawasan". Hal ini diperkuat dengan jumlah kas yang kecil bahkan ada yang minus serta tunggakan atau piutang usaha yang rata-rata mengalami kemacetan. Hasil analisis sementara piutang usaha macet diakibatkan adanya indikasi pengelola yang melakukan *lapping* atau penundaan pembayaran kas dan juga pemakaian tanpa prosedur dan persetujuan pihak otoritas yang ada, adanya Pemanfaat yang tidak membayar dan meninggal dunia serta kurang efektifnya pelaksanaan tugas oleh pendamping kelurahan terhadap UEK-SP yang ada selama ini.

Kata Kunci: UEK-SP, Kelurahan, Evaluasi, Manajemen, Keuangan

1. PENDAHULUAN

Program ini awalnya disebut dengan Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) pertama kali lahir tahun 2005 yang merupakan bagian dari Program K2I (Kemiskinan, Kebodohan, Insfrastruktur) dibawah naungan BPM BangDes (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Desa) Provinsi Riau. Lembaga yang dibentuk disetiap desa/kelurahan dinamakan UED/K-SP (Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam).

Program ini meluncurkan dana Provinsi sharing dengan Kabupaten / Kota ke desa dan Kelurahan sebesar Rp 500.000.000,- per desa/Kelurahan secara bertahap dari tahun 2004 hingga tahun 2013. Pada Bulan Juli Tahun 2014 BPM Bangdes menyurati seluruh Kabupaten/Kota untuk mengambil alih UED/K-SP dari Provinsi. Bulan Agustus Tahun 2014 BPPMKB Kota Pekanbaru membentuk Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kota Pekanbaru.

PPK Kota Pekanbaru ini berbentuk UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam) berdasarkan Perwako no. 24 Tahun 2015 tentang Penguatan Penyelenggaraan UEK-SP dan petunjuk teknisnya (Juknis). Hingga Akhir Tahun 2021, belum ada kejelasan evaluasi pelaksanaan UEK-SP terutama dari segi

keuangan, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penyimpangan dari segi pelaksanaan. UEK-SP sendiri ditujukan guna pengembangan ekonomi berbasis kemasyarakatan melalui pinjaman lunak baik berupa uang atau berupa barang, yang pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola di setiap Kelurahan.

Hingga saat ini terdapat 58 kelurahan yang memiliki UEK-SP di Kota Pekanbaru, dalam perjalanannya selama 6 (enam) tahun terakhir UEK-SP tidak memiliki evaluasi pelaksanaan secara kelembagaan baik secara keuangan maupun sumber daya manusia serta program-program yang akan maupun telah dilaksanakan.

Selama Tahun 2005 hingga 2021 jumlah dana yang bergulir dari UEK-SP adalah sebesar Rp 256.435.596.971 dengan jumlah Pemanfaat sebanyak 35.966 orang. Secara pelaporan, memang dilakukan oleh UEK-SP tersebut kepada sekretariat PPK, namun dalam hal ini tidak ada telaah. Laporan keuangan yang diberikan oleh UEK-SP seringkali terlambat, tidak hanya itu saja bahkan ada beberapa UEK-SP yang tidak aktif. Pencatatan keuangan dan pelaporannya diserahkan ke pengelola UEK-SP setiap kelurahan dan diserahkan ke sekretariat PPK. Setelah pengalihan dari Provinsi Riau ke Kota Pekanbaru, selama tahun berjalan timbul masalah dimana laporan keuangan yang disajikan tidak

sesuai dengan prinsip yang ada seperti jumlah uang kas, piutang, pendapatan. Tidak hanya itu saja, pencatatan UEK-SP di Kota Pekanbaru menggunakan pencatatan yang tidak konsisten atau 'ambigu' dimana dikatakan sebagai Koperasi bukan juga dan dikatakan sebagai lembaga keuangan juga tidak. Selain itu juga evaluasi keuangan tidak pernah dilakukan, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dinas yang terkait dengan program ini.

Hasil penelusuran awal, belum ada satupun penelitian yang membahas tentang masalah evaluasi keuangan UEK-SP baik yang di Kota Pekanbaru maupun di daerah lainnya yang di Indonesia. UEK-SP adalah hal yang khusus bisa dibicarakan, hal ini disebabkan dalam pengelola UEK-SP di Kota Pekanbaru memiliki 3 (tiga) orang yakni ketua, bendahara dan juru taksasi. Sedangkan untuk pengawasnya tidak ada, berbeda dengan koperasi yang memiliki pengawas minimal 3 (tiga) orang. Sedangkan untuk pencairan dana pinjaman pemanfaat dibutuhkan otoritas dari kelurahan. Setiap akhir tahun pelaksanaan UEK-SP dipertanggungjawabkan dengan mengadakan musyawarah tahunan yang melibatkan stake holder seperti lurah, ketua LPM, RT/RW setempat, pendamping dan pihak lainnya yang berkepentingan.

Tujuan penelitian ini adalah menentukan model evaluasi keuangan yang digunakan pada UEK-SP sebagai alat penilaian kesehatan dan pendeteksian apabila terjadi penyelewengan. Hasil penelitian sebelumnya dari Dariana (2019) hanya menggunakan evaluasi UEK-SP pada Desa Kambung Luar menggunakan analisis profitabilitas, Saifullah et al., (2021) menggunakan evaluasi analisis kredit macet untuk pengukuran evaluasi manajemen keuangan, Kurniawan (2017) menyatakan bahwa evaluasi program UEK-SP Kelurahan Sungai Pakning adalah melalui perencanaan program yang baik, Masril et al., (2021) menyatakan evaluasi UEK-SP dilakukan melalui akuntansi piutang yang baik, Elvianti & Wahyuni (2020) menyatakan bahwa dalam sistem pelaporan dan prosedur pengelolaan UEK-SP haruslah transparan dan disertai dengan dokumen yang baik serta menurut Suryani (2017) menyatakan yang baik diawali dengan sistem pengendalian intern yang baik pula. Pahlawan (2022) menyatakan bahwa harus diadakan analisis profitabilitas untuk mengelola modal kerja yang ada pada UEK-SP di salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru. Menurut Mayasari et al., (2018) pada manajemen keuangan dan pembiayaan harus akuntabel dan transparan sehingga dengan demikian kepercayaan masyarakat akan timbul. Harjanti & Utami, (2022) dan Umami (2019) berpendapat bahwa manajemen keuangan UMKM sangatlah penting sebagai bagian untuk pengambilan keputusan serta mengetahui efisiensi dan efektifitas. Menurut Cakranegara & Rahadi (2020), lemahnya sumber daya manusia pada UMKM menentukan jumlah asset yang diperoleh terutama pada pandemic Covid-19 yang berakibat tutupnya usaha yang ada. Hal ini

diperkuat oleh Akhmad & Purnomo (2021) yang menyatakan bahwa salah satu penunjang untuk memperkuat UMKM adalah teknologi informasi yang menggunakan *e-commerce*. Dengan adanya teknologi tersebut akan memperkuat UMKM yang ada serta dapat meningkatkan omset penjualan.

Penelitian dilaksanakan berdasarkan proses perjalanan UEK-SP yang tidak pernah dilakukan evaluasi sebelumnya. Sehingga boleh dikatakan masih belum adanya penelitian yang melakukan sebelumnya. Pelaksanaan UEK-SP ataupun UED-SP tidak ada perbedaannya di Provinsi Riau, hal ini disebabkan ketika itu program ini dipegang oleh Dinas PPM Bangdes (Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa) sejak Tahun 2005, dengan menyeragamkan standar operasional dan standar keuangan yang ada sehingga tidak terdapat perbedaan, yang menjadi perbedaan hanya namanya saja.

2. RUANG LINGKUP

Dalam keputusan untuk membuat model evaluasi keuangan diperlukan pertimbangan secara teoritis dan praktik serta dilakukan melalui *Focus Grup Discussion* (FGD) dengan Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Adapun batasan-batasan penelitian yang digunakan adalah analisis model evaluasi keuangan UEK-SP yang digunakan sebelum Tahun 2021 dan yang akan digunakan setelah Tahun 2022.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk membuat evaluasi model keuangan UEK-SP di Kota Pekanbaru sebagai alat penilaian kesehatan sebagai pengukuran dan membawa dampak positif bagi kinerja UEK-SP di Kota Pekanbaru. Akan tetapi tidak hanya sampai di situ saja disebabkan keseragaman antara SOP Administrasi Keuangan baik UEK-SP maupun UED-SP sehingga dapat dipergunakan, yang menjadi perbedaan hanyalah nama saja.

3. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dengan memperhatikan beberapa rasio keuangan Koperasi / Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Evaluasi Keuangan

Dalam evaluasi keuangan berbagai metode ada seperti konsep laporan keuangan, model rasio keuangan, model kesehatan koperasi maupun analisis laporan keuangan itu sendiri. Adapun evaluasi nantinya pemakaiannya tergantung kepada tujuan penggunaannya.

1. Konsep Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikelola adalah: Neraca atau Laporan Laba/Rugi, hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perusahaan Posisi Keuangan (Harahap, 2018). Bagi para analis, Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai prestasi dan ekonomis suatu perusahaan. Pada tahap pertama

seorang analisis tidak akan mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu perusahaan dan seandainya dilakukan. Oleh karena itu yang paling penting adalah media laporan keuangan, Laporan keuangan inilah yang menjadi media sarana informasi (screen) bagi analisis dalam proses pengambilan keputusan. Bagi suatu perusahaan, penyajian laporan keuangan secara khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan hal ini sesuai dengan fungsi manager keuangan, yaitu merencanakan, mencari, memanfaatkan dana perusahaan dan memaksimalkan dana perusahaan (Kasmir, 2018). Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan keuangan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, dengan adanya laporan keuangan, dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan tersebut dianalisis.

2. Konsep Rasio Keuangan Konvensional

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lain-nya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Misalnya antara utang dan modal, antara Kas dan Total Aset, antara Harga Pokok produksi dengan total mutu penjualan, dan sebagainya. Teknik ini sangat lazim digunakan para analisis keuangan. Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan itu bisa banyak sekali. (Harahap, 2018)

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan analisis perusahaan memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dijelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisis tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.

Salah satu parameter untuk menilai tingkat kinerja keuangan perusahaan adalah rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini sangat membantu dalam menilai kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan di masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang. Melalui analisis rasio juga dapat diukur apakah perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya, apakah besarnya piutang pada perusahaan cukup rasional, sejauh mana efisiensi dan efektivitas pendayagunaan seluruh aktiva yang dimiliki

perusahaan, serta bagaimana kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba.

Analisis Rasio Keuangan merupakan perhitungan yang dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan. Teknik dengan menggunakan rasio ini merupakan cara yang saat ini masih paling efektif dalam mengukur tingkat kinerja serta prestasi keuangan perusahaan.

Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lain-nya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

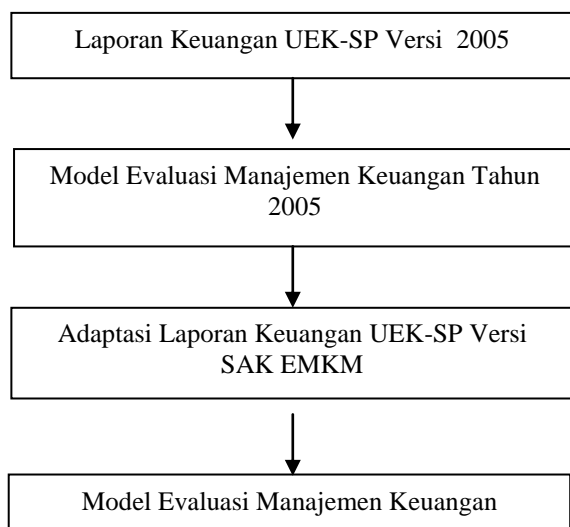
Cara penggunaan rasio keuangan dapat menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Oleh karena itu, penggunaan rasio keuangan ditekankan pada pengukuran rasio profitabilitas dimana angka setelah rasio dihitung maka langkah berikutnya adalah menganalisa kinerja keuangan perusahaan dari angka-angka rasio tersebut.

Perbedaan jenis perusahaan dapat menimbulkan perbedaan rasio yang penting. Misalkan rasio ideal mengenai likuiditas untuk bank tidak sama dengan rasio pada perusahaan industri perdagangan, atau jasa. Oleh karenanya, di dalam laporan keuangan mengenai *average industry ratio* di Amerika perusahaan yang menerbitkan membagi-bagi rasio menurut jenis perusahaan bahkan menurut sub- sub industri yang lebih rinci.

3. Rasio Keuangan Koperasi/UMKM

Rasio keuangan koperasi dan UMKM juga melibatkan sebagian kecil atau beberapa rasio keuangan perusahaan yang ada. Akan tetapi karena koperasi dan UMKM hanyalah ada di Indonesia sehingga perlu modifikasi dari peraturan Pemerintah Indonesia. Penyusunan laporan keuangan koperasi dan UMKM didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Tahun 1998 telah mengeluarkan model pencatatan laporan keuangan Koperasi sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Akuntansi Koperasi yang dikeluarkan pada Bulan Juli 1998. Akan tetapi seiring dengan perkembangan PSAK Akuntansi Koperasi pada tanggal 1 Januari 2012. Adapun alasan tidak diberlakukannya lagi PSAK No. 27 karena secara prinsip Standar Akuntansi Keuangan lainnya termasuk koperasi dan UMKM mengacu kepada IFRS (International Financial Reporting Standar). Meskipun demikian Kementerian Koperasi dan UMKM tetap mengatur sehingga terjadi keseragaman dalam pelaporan keuangan koperasi.

Untuk pengukuran model evaluasi manajemen keuangan Koperasi dan UMKM juga dikembangkan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06 /PER/DEP.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

4. PEMBAHASAN

Berikut ini akan dijelaskan proses model evaluasi keuangan yang menjabarkan tentang kondisi keuangan pada 58 (lima puluh delapan) UEK-SP di Kota Pekanbaru.

4.1 Jumlah Pencairan Dana

Pada Tabel 1 diketahui jumlah pencairan dana selama Tahun 2021 dengan total pencairan untuk Pemanfaat adalah sebesar Rp 4.802.699.982. Jumlah terbesar yang melaksanakan pencairan pinjaman pemanfaat adalah Kelurahan Muara Fajar dengan nilai pinjaman sebesar Rp 374.000.000,-. Terdapat juga kelurahan yang tidak mencairkan pinjaman pemanfaat, hal ini disebabkan karena UEK-SP tersebut tidak aktif, tidak terdapat pengurus, adanya konflik serta kehati-hatian pengurus dalam mencairkan pinjaman.

Tabel 1. Jumlah Distribusi Pencairan Dana

Jumlah Pencairan		Jumlah
≥ 0	-	54.844.239
54.844.240	-	109.688.480
109.688.481	-	164.532.720
164.532.721	-	219.376.960
219.376.961	-	274.221.201
274.221.202	-	329.065.441
329.065.442	-	383.909.681
Total		58

Adapun kelurahan yang tidak melaksanakan pencairan terdapat 15 (lima belas) kelurahan yaitu Kelurahan Pesisir, Maharatu, Labuh Baru Timur, Tampan, Kampung Bandar, Sukamulia, Tangkerang Barat, Limbungan, Pulau Karamah, Tangkerang Labuai, Sri Meranti, Kota Baru, Sukaramai, Kampung Baru, Cinta Raja dan Kota Tinggi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

4.2 Jumlah Tunggakan, Pendapatan dan Prosentase Tunggakan

Berdasarkan Tabel 2, jumlah rata-rata tunggakan jika dibandingkan dengan pendapatan selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 11,89% yakni dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 18.152.072.077 sedangkan pendapatan hanyalah sebesar Rp. 1.067.974.289. Dengan kata lain terdapat selisih pendapatan terhadap tunggakan adalah sebesar Rp. 17.084.097.788. Adapun 5 (lima) kelurahan yang prosentase tunggakan yang terbesar adalah kelurahan Tebing Tinggi Okura sebesar 57,07%, Kelurahan Lembai Damai sebesar Rp. 57,63%, Kelurahan Muara Fajar sebesar 67,02%, Kelurahan Lembahsari sebesar 64,30% dan Kelurahan Tuah Karya sebesar 127,42%. Hal ini mengindikasikan berarti pendapatan yang diperoleh pada Kelurahan Tuah Karya terdapat pemanfaat yang sudah lama membayar kembali pinjaman yang telah dilakukan.

Tabel 2. Jumlah Persentase Tunggakan terhadap Pendapatan

Jumlah Pencairan		Jumlah
≥ 0	-	19%
20%	-	39%
40%	-	58%
59%	-	78%
79%	-	98%
99%	-	117%
118%	-	137%
Total		58

Untuk selisih pendapatan terhadap tunggakan yang ada pada 58 (lima puluh delapan) kelurahan yang ada di

Kota Pekanbaru dengan jumlah pendapatan yang kecil dan tunggakan menjadi besar meliputi Kelurahan Sukaramai dan Kota Tinggi sebesar 0%, Kelurahan Sukamaju sebesar 0,08%, Kelurahan Sukamulia dan Tangkerang Timur masing-masing sebesar 0,14%, Kelurahan Kampung Baru sebesar Rp. 0,18% dan Kelurahan Labuh Baru Timur sebesar 0,19%. Adapun jumlah pendapatan selama Tahun 2012 untuk kelurahan tersebut mulai dari nol rupiah hingga Rp. 1.110.000,-.

Jumlah tunggakan satu hingga dua bulan yang terkecil belum dibayarkan totalnya mencapai Rp. 752.637.629 dengan nilai terkecil sebesar Rp. 971.222 berada pada Kelurahan Lembah Damai dan terbesar adalah sebesar Rp. 75.701.889 berada pada Kelurahan Kulim. Sedangkan rata-rata tunggakannya adalah senilai Rp. 12.976.511.

Untuk tunggakan selama tiga hingga empat bulan total nilainya mencapai Rp. 1.202.454.287. dengan nilai terendah adalah senilai Rp. 2.580.000 berada pada Kelurahan Sukaramai dan yang tertinggi adalah sebesar Rp. 73.290.000 berada pada Kelurahan Kulim dengan nilai rata-rata Rp. 20.731.970. Untuk tunggakan yang belum lima sampai 6 bulan yang belum dibayarkan total nilainya mencapai Rp. 1.774.054.062,78 dengan nilai terendah adalah senilai Rp. 4.577.500 berada pada Kelurahan Lembah Sari dan nilai tertinggi adalah senilai Rp. 63.926.000 berada pada Kelurahan Tangkerang Tengah dengan nilai rata-rata Rp. 30.587.139.

Selama Tahun 2021, jumlah tunggakan pemanfaat mencapai Rp. 18.152.072.077 dengan 5 kelurahan jumlah tertinggi berada pada Kelurahan Labuh Baru Timur senilai Rp. 570.940.778, Kelurahan Tangkerang Tengah senilai Rp. 564.414.889, Kelurahan Pesisir senilai Rp. 553.142.189, Kelurahan Tangkerang Timur senilai Rp. 539.254.778 dan Kelurahan Kampung Melayu senilai Rp. 515.082.522.

Untuk jumlah tunggakan yang terendah pada Tahun 2021 berada pada kelurahan adalah pada Kelurahan Buah Karya sebesar Rp. 51.538.778, Kelurahan Lembah Damai sebesar Rp. 74.097.822, Kelurahan Lembahsari sebesar Rp. 75.194.111 dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura senilai Rp. 90.285.444.

Jika dianalisa maka hampir semua UEK-SP mengalami kemacetan dalam pembayaran atau terjadi tunggakan dengan nilai bervariasi. Jumlah total tunggakan atau piutang macet UEK-SP di Kota Pekanbaru pada Tahun 2021 nilainya mencapai Rp. 18.134.220.238,41 dengan nilai terendah senilai Rp. 51.538.778 berada pada Kelurahan Buah Karya dan nilai tertinggi senilai Rp. 570.940.778 berada pada Labuh Baru Timur dengan nilai rata-rata tunggakan macet senilai Rp. 248.363.349.

Hasil penelitian Suryani (2017) menyatakan bahwa penyebab terjadinya kredit macet pada UED SP Desa Lubuk Muda adalah karena kelalaian petugas, sistem pengendalian/kontrol yang lemah serta kesadaran pemanfaat dalam membayar sejumlah hutangnya yang masih rendah.

4.3 Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pada Tabel 3 dapat diketahui Sisa Hasil Usaha (SHU) UEK-SP di Kota Pekanbaru. SHU merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya yang diperoleh. Jumlah total SHU UEK-SP di Kota Pekanbaru selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 314.980.114 atau sebesar 29,49%. Jumlah SHU yang tertinggi adalah pada Kelurahan Buah Karya senilai Rp. 29.934.066, Kelurahan Muara Fajar senilai Rp. 19.437.268, Kelurahan Simpang Baru senilai Rp. 18.009.979 dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura senilai Rp. 18.609.940. Untuk SHU yang bernilai rendah SHU UEK-SP nya adalah antara Rp. -1.771.891.

Tabel 3. Prosentase SHU

Prosentase SHU			Jumlah
≥ -100	-	-49%	3
-48%	-	3%	7
4%	-	54%	33
55%	-	106%	12
107%	-	158%	2
159%	-	210%	0
211%	-	261%	1
Total			58

Selama Tahun 2021, jumlah pendapatan pada UEK-SP di Kota Pekanbaru dengan jumlah tertinggi adalah sebesar Rp. 71.064.311 di Kelurahan Muara Fajar, Rp. 65.673.399 di Kelurahan Buah Karya, Rp. 55.498.000 pada Kelurahan Simpang Tiga, Rp. 54.374.500 di Kelurahan Tanjung Rhu, Rp. 53.103.568 pada Kelurahan Simpang Baru dan senilai Rp. 51.524.115 pada Kelurahan Tebing Tinggi Okura. Jumlah pendapatan yang terkecil dengan jumlah dibawah Rp. 1.000.000,- bahkan ada yang tidak memiliki pendapatan. Adapun UEK-SP yang tidak memiliki pendapatan adalah pada Kelurahan pada Sukaramai dan Kota Tinggi, sedang pendapatan yang dibawah Rp. 1.000.000,- adalah pada Kelurahan Sukamaju senilai Rp. 275.000, Kelurahan Kampung Dalam senilai Rp. 550.000, Kelurahan Sukamulia senilai Rp. 507.500, Kelurahan Cintaraja senilai Rp. 687.500, Kelurahan Kampung Baru senilai Rp. 751.000, Kelurahan Tangkerang Timur senilai Rp. 912.500, dan Kelurahan Rejosari senilai Rp. 912.500,-

Untuk biaya selama Tahun 2021, jumlah biaya tertinggi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 51.627.043, biaya yang terendah adalah sebesar Rp. 113.000,- dengan biaya rata-rata yang dikeluarkan sebesar Rp. 12.991.330 dengan jumlah biaya yang dikeluarkan selama Tahun 2021 adalah senilai Rp. 753.497.131. Adapun jumlah biaya yang tertinggi dikeluarkan adalah yang berada diatas Rp. 30.000.000,-. Adapun kelurahan pada UEK-SP yang memiliki biaya diatas Rp. 30.000.000,- adalah Kelurahan Tebing Tinggi Okura sebesar Rp. 32.914.175, Kelurahan Lembahsari Rp.

33.802.776, Kelurahan Simpang Baru sebesar Rp.35.093.589,- Kelurahan Tuah Karya sebesar Rp. 35.738.333, Kelurahan Tanjung Rhu senilai Rp. 38.515.969, Kelurahan Simpang Tiga senilai Rp.43.480.000 dan Kelurahan Muara Fajar senilai Rp. 51.627.043.

4.4 Jumlah Uang Kas

Berdasarkan Tabel 4, jumlah uang kas yang terkecil adalah Rp. -1.771.891 hingga Rp. 0 (nol) dengan perincian sebagai berikut Rp. 0 (nol) adalah Kelurahan Sri Meranti senilai Rp. -1.771.891, Kelurahan Tangkerang Timur senilai Rp. -1.352.890, Kelurahan Kota Tinggi senilai Rp. -1.082.778, Kelurahan Kota Baru senilai Rp. -360.432, Kelurahan Palas senilai Rp. -141.465, Kelurahan Sukaramai senilai Rp. -113.000, Kelurahan Sekip senilai Rp. -65.484, Kelurahan Cintaraja senilai Rp. -46.500, Kelurahan Kampung Baru senilai Rp. -32.000,- dan Kelurahan Tangkerang Barat senilai Rp. 0 (nol).

Jika dilihat jumlah kas UEK-SP yang terbesar adalah pada Kelurahan Rejosari dan Kelurahan Tampan dengan bernilai masing-masing Rp. 311.708.950 dan Rp. 315.462.800.

Tabel 4. Uang Kas UEK-SP Per 31 Desember 2021

Uang Kas	Jumlah
≥ 23.000	38
46.279.833,91	7
92.536.667,82	8
138.793.501,72	2
185.050.335,63	1
231.307.169,54	0
277.564.003,45	2
Total	58

4.5 Model Evaluasi Manajemen Keuangan UEK-SP

Pada Tabel 5 dapat diketahui jumlah persentase tingkat pengembalian dana UEK-SP. Peralihan UEK-SP dari Provinsi Riau ke Kota Pekanbaru terjadi pada tahun 2015. Dalam perjalanannya, Kota Pekanbaru hanya mengambil sistem keuangan dan analisis Kesehatan UEK-SP yang berasal dari Provinsi Riau tanpa mengevaluasi terlebih dahulu. Hal ini seharusnya dilakukan oleh PPK Kota Pekanbaru disebabkan UEK-SP berada di Provinsi Riau sejak Tahun 2005. Ditambah lagi seiring dengan perjalanannya waktu hingga Tahun 2021 belum ada evaluasi terhadap manajemen keuangan yang mengisyaratkan tingkat Kesehatan UEK-SP di Kota Pekanbaru selama ini.

Tabel 5 .Tingkat Pengembalian UEK-SP

Kelurahan	Target	Realisasi	%	Skor
	(Rp00.000)	(Rp00.000)	Realisasi	
Tingkat Pengembalian UEK				
Muara Fajar	150.770	150.316	100%	4
Umbansari	112.627	111.201	99%	4
Simpang Baru Sidomulyo Barat	120.457	117.221	97%	4
Mentangor / Kulim	57.703	54.092	94%	3
Bencah Lesung / Sail	104.398	100.276	96%	4
Simpang Tiga Tangkerang Tengah	113.490	108.920	96%	4
Tengah	113.528	112.265	99%	4
Kampung Tengah	85.588	77.908	91%	3
Pesisir	97.054	94.266	97%	4
Tanjung Rhu	83.874	76.288	91%	3
Lembah Damai	174.041	173.915	100%	4
Meranti Pandak Kampung Melayu	106.566	105.634	99%	4
Tangkerang Selatan	94.959	90.064	95%	3
	76.206	69.840	92%	3
	77.551	74.823	96%	4

Adapun evaluasi manajemen keuangan yang dipergunakan oleh UEK-SP di Kota Pekanbaru selama ini adalah tingkat pengembalian UEK dengan rumusnya perbandingan antara target dan realisasi pengembalian dana UEK-SP, rasio BOPO merupakan perbandingan Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi UEK-SP di Kota Pekanbaru, *Return on Asset* (ROA) yaitu perbandingan antara laba tahun/bulan berjalan terhadap Aktiva UEK-SP, *Rasio Asset Liquid* yang merupakan perbandingan antara perkembangan dana liquid terhadap alokasi dana awal dan rasio cadangan modal terhadap tunggakan yang merupakan perbandingan antara cadangan modal terhadap tunggakan bulan berjalan.

Dari hasil analisis peneliti, untuk tingkat pengembalian dana UEK di dalam penentuannya memang dilakukan oleh pengelola UEK SP di Kota Pekanbaru, hanya saja jumlah yang diambil adalah jumlah akumulasi dari pinjaman atau pencairan dana yang ada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5. Jika dibandingkan dengan dana yang dicairkan jelaslah angkanya lebih banyak. Seharusnya dalam penghitungannya hanya jumlah target dengan realisasi per bulan atau per tahun yang dibandingkan saja, bukan akumulasi selama berdirinya UEK-SP saja.

Penilaian BOPO dapat dilihat pada Tabel 6. UEK-SP di Kelurahan Labuh Baru Timur dan Kelurahan Tampan, dalam kasusnya sudah menggunakan acuan yang telah ada yakni dimana biaya yang diperkenankan

dipergunakan hanyalah sebesar 75% dari pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian berarti apabila penggunaan pendapatan melebihi dari 75% akan memperoleh penilaian atau skor 1.

Tabel 6 .Tingkat Pengembalian UEK-SP

Kelurahan	Jumlah Pendapatan (Ribuan)	Jumlah Biaya (Ribuan)	Rasio Biaya thd Pendapatan	Skor	Rasio BOPO-UEK	
Muara Fajar	1.284,83	921,02	71,68%	2		
Umbansari	770,77	521,96	67,72%	2		
Simpang Baru Sidomulyo Barat	940,90	603,79	64,17%	2		
Mentangor / Kulim	420,77	255,37	60,69%	2		
Bencah Lesung / Sail	211,20	205,23	97,17%	1		
Simpang Tiga Tangkerang Tengah	294,53	258,32	87,71%	1		
Kampung Tengah	918,44	592,61	64,52%	2		
Pesisir	67,20	2,56	3,81%	4		
Tanjung Rhu	695,95	415,72	59,73%	3		
Lembah Damai	92,37	64,49	69,82%	2		
Meranti Pandak	618,55	376,14	60,81%	2		
Kampung Melayu	612,26	371,58	60,69%	2		
Tangerang Selatan	513,52	371,55	72,35%	2		
Maharatu Labuh Baru Timur	41,06	49,71	121,09%	1		
Tampar	0,00	0,00	0,00%	1		
Padang Bulan	14,66	0,00	0,00%	4		
Kampung Bandar	135,10	77,82	57,60%	3		
	30,80	35,82	116,29%	1		

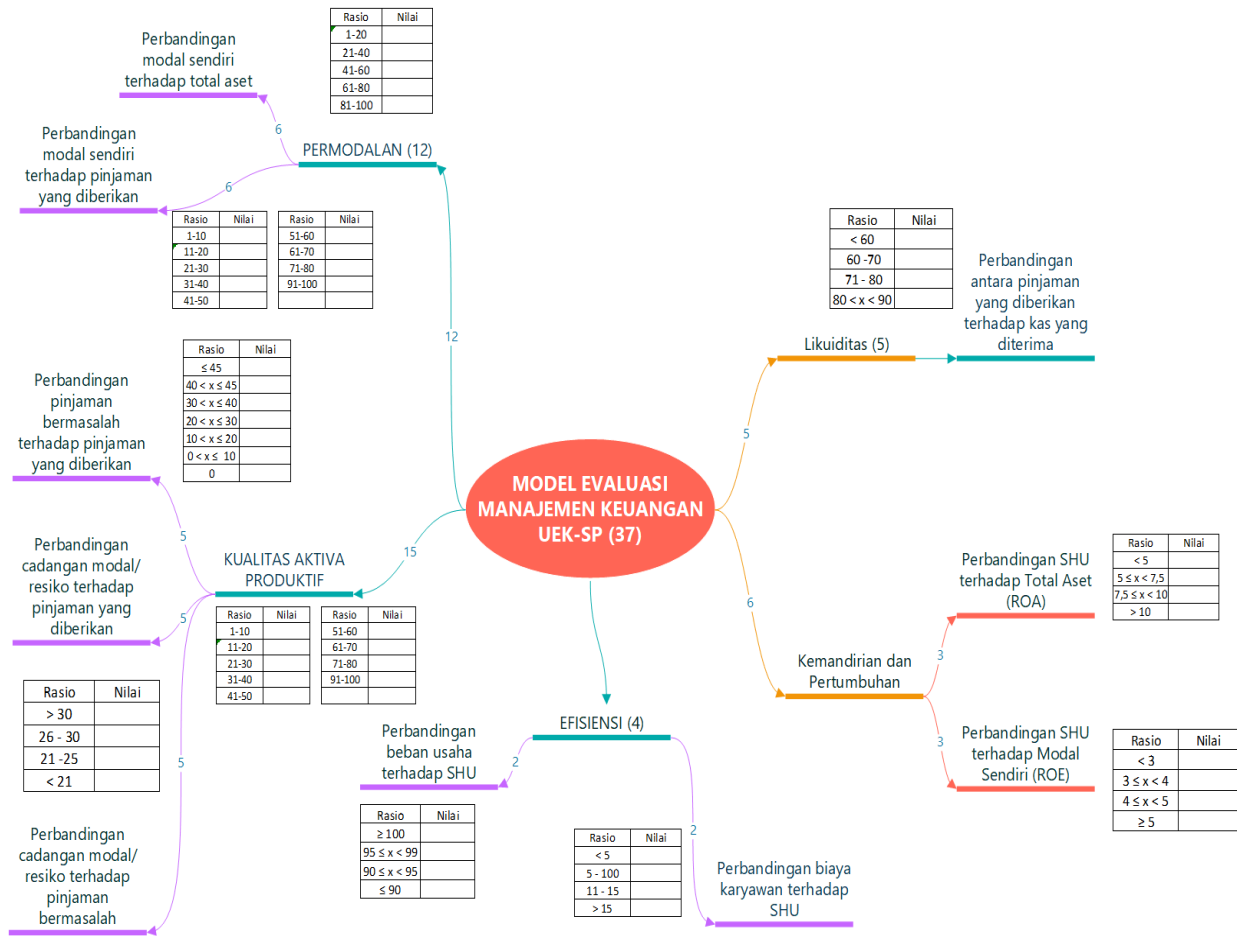
Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6. Sebagai contoh Kelurahan Mentangor dan Bencah Lesung dengan nilai BOPO masing-masing senilai 97,71% dan 87,71% dan memperoleh skor masing-masing 1 (satu). Begitu juga

dengan Kelurahan Labuh Baru Timur memperoleh skor 1 (satu) juga karena pendapatan dan biaya masing-masing 0 (nol).

Untuk penilaian ROA dapat dilihat pada Tabel 7. Hasil analisis unsur ROA belum sesuai penggunaannya, hal ini UEK-SP di Kota Pekanbaru tidak untuk keuntungan semata, akan tetapi untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu diadakan perbaikan. Jika dilihat dari penghitungannya jumlah laba berjalan tidak seimbang dengan asset yang dimiliki sehingga memperoleh angka yang tidak cukup baik.

Tabel 7. Penghitungan ROA

Kelurahan	SHU	Asset UEK	Rasio Laba thp Asset	Skor	Return on Asset (ROA) -UEK	
Muara Fajar	363.812	7.325.990	4,97%	3		
Umbansari	248.809	6.667.130	3,73%	2		
Simpang Baru	337.107	8.308.080	4,06%	3		
Sidomulyo Barat	165.396	6.903.029	2,40%	1		
Mentangor / Kulim	5.968	7.127.780	0,08%	1		
Bencah Lesung / Sail	36.206	6.170.255	0,59%	1		
Simpang Tiga Tangkerang Tengah	325.827	7.595.346	4,29%	3		
Kampung Tengah	64.639	7.344.711	0,88%	1		
Pesisir	280.231	7.115.697	3,94%	2		
Tanjung Rhu	27.877	6.232.452	0,45%	1		
Lembah Damai	242.411	7.189.652	3,37%	2		
Meranti Pandak	240.684	5.255.663	4,58%	3		
Kampung Melayu	141.964	6.488.924	2,19%	1		
Tangerang Selatan	60.688	6.827.309	0,89%	1		
	67.968	5.210.579	1,30%	1		
Maharatu	-8.658	6.995.737	-0,12%	1		



Gambar 2. Model Evaluasi Manajemen Keuangan UEK-SP

Menurut peneliti dengan adanya asset yang masih ada kemungkinan untuk ditagih haruslah dilaksanakan secara optimal. Ketidakefektifan pendamping juga haruslah di evaluasi dalam pelaksanaannya sebagai bagian penguatan UEK-SP di Kota Pekanbaru terutama dalam memperoleh pendapatan. *Rasio asset liquid* merupakan perbandingan antara perkembangan dana liquid terhadap alokasi dana awal. Jika dilihat dari angka yang ada rasio liquid diperoleh dari angka pinjaman tahun berjalan dibandingkan dengan modal awal yang diberikan oleh pemerintah. Hanya saja terdapat beberapa UEK-SP yang diserahkan seharusnya dihitung Kembali sebagai modal awal seperti UEK-SP yang didirikan pada Tahun 2005 hingga 2014 seharusnya setelah serah terima dari Pemerintah Provinsi Riau ke Pemerintah Kota Pekanbaru diadakan penghitungan jumlah asset sebagai modal awal bukan modal awal ketika UEK-SP tersebut didirikan pertama kali oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Rasio cadangan modal terhadap tunggakan yang merupakan perbandingan antara cadangan modal terhadap tunggakan bulan berjalan. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu cadangan modal yang ada hingga saat ini tidak berbentuk kas atau barang berharga

lainnya lagi karena sudah juga dipakai untuk pemakaian pemanfaat. Hal ini tentu saja seharusnya perlu diadakan penghitungan Kembali berapa dana cadangan modal yang ada sebenarnya. Sehingga diyakini bahwa rasio cadangan modal juga tidak bisa mewakili ukuran penilaian Kesehatan UEK-SP di Kota Pekanbaru.

Pada *Non Performing Loan (NPL)* dalam pelaksanaannya sudah mewakili bagian dari manajemen Kesehatan suatu badan. Akan tetapi biasa digunakan oleh Lembaga Keuangan Perbankan. Menurut peneliti ini juga bisa disesuaikan hanya saja perlu perhatian lebih cermat lagi dalam penggunaannya, disebabkan belum adanya referensi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menggunakan indikator kesehatan koperasi dan berbasis kepada ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) sebagaimana yang disyaratkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Adapun model evaluasi manajemen keuangan UEK-SP dapat dilihat pada Gambar 2. Indikator model evaluasi manajemen keuangan UEK-SP adalah sebagai berikut ; permodalan dengan nilai skor maksimal 12 yang terdiri dari 2 kategori yakni perbandingan modal sendiri dengan

total asset dengan nilai adalah skor maksimal 6. Perbandingan modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan dengan nilai skor maksimal senilai 6. Kualitas aktiva produktif dengan nilai skor maksimal 15 yang terdiri dari kategori ; perbandingan pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dengan skor maksimal 5, perbandingan modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan dengan skor maksimal 5 dan perbandingan cadangan modal/resiko terhadap pinjaman yang bermasalah dengan skor maksimal 5. Rasio efisiensi yang terdiri dari perbandingan beban usaha terhadap SHU dengan skor maksimal 4 dan perbandingan biaya karyawan terhadap SHU dengan skor maksimal 2. Rasio likuiditas dengan skor maksimal 5 yang merupakan perbandingan antara pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima (kas) serta kemandirian dan pertumbuhan yang terdiri dari perbandingan SHU terhadap Total Aset dengan skor maksimal 3 dan perbandingan SHU terhadap Modal Sendiri dengan skor maksimal 3.

Yang menjadi pertimbangan pembentukan rasio permodalan adalah untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi modal yang digunakan terhadap perolehan total dan pinjaman yang diberikan, sehingga dengan demikian dapat diketahui perolehan prosentase perubahan asset dan modal. Pada kualitas aktiva produktif diukur menggunakan pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan yang bertujuan agar diketahui seberapa besar dana yang digunakan oleh peminjam dapat kembali dan berapa jumlah dana yang mengalami masalah. Penggunaan perbandingan modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan bertujuan untuk mengetahui perputaran SHU yang dihasilkan sebagai penambah modal itu sendiri. Sedangkan perbandingan cadangan modal/resiko terhadap pinjaman yang bermasalah ditujukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia jika seandainya ada resiko kerugian yang akan diterima oleh UEK-SP.

Dari hasil penelitian, penilaian efisiensi dimunculkan untuk mengetahui perbandingan beban usaha terhadap SHU dan biaya karyawan terhadap SHU. Secara umum terdapat kesepakatan pengelola di seluruh UEK-SP bahwa beban usaha tidak boleh melebihi 85% dari SHU yang diterima, hal ini bertujuan sebagai landasan untuk efisiensi dan efektifitas kinerja pengelola. Akan tetapi dengan ada efektifitas, jika SHU UEK-SP kecil dari 15% terhadap biaya karyawan, maka bisa digunakan untuk penambah penghasilan bagi karyawan.

Rasio likuiditas dimunculkan untuk mengetahui berapa dana kas yang diperoleh dari pinjaman yang ada sehingga dengan demikian dana yang kembali tersebut dapat digulirkan lagi bagi peminjam lainnya. Dan rasio kemandirian dan pertumbuhan dimunculkan untuk mengetahui pertumbuhan UEK-SP baik melalui SHU maupun melalui modal sendiri.

Dari hasil penghitungan, pada evaluasi manajemen keuangan UEK-SP yang digunakan Tahun 2015 terdapat 4 UEK-SP yang kategori sehat, 8 UEK-SP kategori

cukup sehat, 32 UEK-SP kategori kurang sehat dan 14 UEK-SP kategori tidak sehat. Sedangkan untuk penilaian UEK-SP yang peneliti menyatakan 58 UEK-SP di Kota Pekanbaru, secara umum, hasil model evaluasi manajemen keuangan UEK-SP diperoleh penghitungan dalam kondisi "Dalam Pengawasan". Hal ini diperkuat dengan kas yang jumlah yang kecil bahkan ada yang minus serta tunggakan atau piutang usaha yang rata-rata mengalami kemacetan. Hasil analisis sementara piutang usaha macet diakibatkan adanya indikasi pengelola yang melakukan *lapping* atau penundaan pembayaran kas dan juga pemakaian tanpa prosedur dan persetujuan pihak otoritas yang ada. Untuk memudahkan dengan adanya *website* pengolahan data sebagaimana yang diungkapkan oleh Prasetyo, (2018) ada baiknya dilakukan, agar pengelolaan keuangan lebih mudah dilakukan dan dikontrol, terutama untuk mengetahui SHU, biaya karyawan serta simpan-pinjam pada UEK-SP yang ada.

Oleh sebab ini merupakan penelitian awal sehingga perlu adanya penelitian lanjutan untuk melakukan penilaian UEK-SP dengan melibatkan *stakeholder* yang ada. Selain itu juga perlu pemikiran transformasi UEK-SP sebagaimana yang disarankan oleh Hildawati & Meirina Suri (2020) agar menjadi Lembaga Keuangan Mikro. Hal ini agar keberlanjutan dari UEK-SP bisa tetap berjalan dan bahkan meningkat sebagaimana yang diteliti oleh Librianty et al (2021), (Mahalidikri & Tantina, 2020), Maiyori & Yusuf Daeng, (2021). Terlebih lagi kebanyakan peminjam atau peminjam adalah rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memajukan usahanya (Rifai et al., 2017). Tidak hanya itu saja menurut Supeno (2018) hasil penelitiannya menunjukkan variabel modal manusia, modal pelanggan dan modal struktural baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap kinerja UED-SP di Pekanbaru Provinsi Riau. Hal ini juga bisa menjadi landasan untuk memperbaiki terutama kinerja manajemen keuangan yang ada pada UEK-SP di Kota Pekanbaru

Menurut Zebua et al (2022) laporan pelaksanaan haruslah dilaksanakan sebagaimana layaknya laporan di desa ataupun kelurahan agar pertanggungjawaban dapat diketahui oleh masyarakat, untuk itu perlu adanya manajemen keuangan UEK-SP yang baik juga. Menurut Hermanto et al (2019) penggunaan menggunakan program komputer agar unsur manajemen keuangan dapat diorganisasi dengan baik sangat disarankan. Yuwono (2020) menyarankan pentingnya pendampingan, penggunaan teknologi terutama untuk pencatatan dan serta adanya standar pelayanan minimal manajemen keuangan UMKM yang ada sebagai upaya pembenahan. Hal ini tentu saja termasuk juga UEK-SP di Kota Pekanbaru.

5. KESIMPULAN

Penggunaan rasio target dan realisasi, BOPO, ROA, rasio aset liquid dan rasio cadangan modal terhadap

tunggakan yang ada dirasa kurang efektif, sehingga perlu peninjauan ulang. Selain karena perkembangan zaman, program UEK-SP yang merupakan program pemberdayaan masyarakat bukan tujuan mencari keuntungan semata saja sehingga perlu ditinjau dalam model evaluasi manajemen keuangannya. Peneliti dalam hal ini mengajukan model evaluasi keuangan UEK-SP di Kota Pekanbaru menggunakan permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas dan kemandirian dan pertumbuhan. Dari hasil penghitungan, pada evaluasi manajemen keuangan UEK-SP yang digunakan Tahun 2015 terdapat 4 UEK-SP yang kategori sehat, 8 UEK-SP kategori cukup sehat, 32 UEK-SP kategori kurang sehat dan 14 UEK-SP kategori tidak sehat. Sedangkan untuk penilaian UEK-SP yang peneliti menyatakan 58 UEK-SP di Kota Pekanbaru, secara umum, hasil model evaluasi manajemen keuangan UEK-SP diperoleh penghitungan dalam kondisi “Dalam Pengawasan”.

6. SARAN

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan UEK-SP di Kota Pekanbaru. Penggunaan model evaluasi manajemen keuangan sangat disarankan untuk digunakan sebagai salah satu alat pengambilan keputusan terhadap 58 (lima puluh delapan) di Kota Pekanbaru, karena dengan demikian diharapkan pelaksanaan UEK-SP yang selama ini berjalan dapat diperbaiki baik dari segi manajemen maupun dari pendamping. Belum adanya pengukuran UMKM yang ada di Provinsi Riau khususnya yang dibawah pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan model evaluasi manajemen keuangan ini dapat digunakan pada UMKM yang sama. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan penggunaan model lain yang digunakan sebagai penguat alat evaluasi manajemen keuangan pada UEK-SP yang ada. Dengan harapan UEK-SP yang ada di Kota Pekanbaru khususnya dapat tumbuh sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu saja, model evaluasi keuangan ini juga dapat diterapkan pada UED-SP yang ada pada kabupaten di Provinsi Riau juga.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A., & Purnomo, S. (2021). Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Sebatik*, 25(1). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1293>
- Cakranegara, P. A., & Rahadi, D. R. (2020). Sumber Daya Manusia Sektor UMKM Di Kala Pandemi Covid-19. *Sebatik*, 24(2), 315–320. <https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1126>
- Dariana. (2019). Analisis Rasio Profitabilitas Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Kembang Luar Ditinjau Dari Perspektif Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah (Juni)*, 3(1), 87–101. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas>
- Elvianti, & Wahyuni, E. S. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Pelaporan dan Prosedur Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT)*, 199–224.
- Harahap, S. S. (2018). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (14th ed.). Rajawali Pers.
- Harjanti, R. S., & Utami, E. U. S. (2022). Analisis Manajemen Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerupuk Lemi Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(2), 193–201. <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant>
- Hermanto, B., Yusman, M., & Nagara. (2019). Sistem informasi manajemen keuangan pada PT. HULU Balang Mandiri menggunakan framework laravel. *Jurnal Komputasi*, 7(1), 17–79.
- Hildawati, & Meirina Suri, D. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1). [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4939](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4939)
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (11th ed.). Raja GrafindoPersada.
- Kurniawan, M. R. (2017). Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Perdana Mandiri Sejahtera Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2014. *JOM Fisip*, 4(1), 1–15.
- Librianty, N., Farhas, R. J., Kusuma, Y. Y., Yadi, H. A., & Nurjamhari, R. (2021). *Analisis Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kota Pekanbaru Pada Program Pemberdayaan Kelurahan*. <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/upload/riset/143-lampiran.pdf>
- Mahalizikri, I. F., & Tantina, N. A. (2020). Pengaruh Pembiayaan UED-SP Terhadap Efektivitas Usaha Masyarakat Desa Pada Bidang Pertanian Kecamatan Bantan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 32–44. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.198>
- Maiyori, C., & Yusuf Daeng, F. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Modal Usaha Mikro pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi. *Hukum Doctrinal*, 6(2), 1–16.
- Masril, Jefriyanto, & Nurjanah, S. (2021). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Piutang Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Belutu Jaya Kecamatan Kandis Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi (MEKA)*, 2(2), 278–283. <http://ejournal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka>

- Mayasari, R., Shopiana, & Julham, T. (2018). Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan. *Sabilarrasyad*, 03(2), 77–90.
- Pahlawan, R. (2022). Analisis Profitabilitas Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Amanah Mandiri Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. *Ensiklopedia of Journal*, 4(3), 244–255. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/319/pdf>
- Prasetyo, D. Y. (2018). Website Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam. *JUTI-UNISI(JurnalTenikIndustriUNISI)*, 2(1), 35–43.
- Rifai, A., Siswanto, & Sayamar, E. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedalaman Jangkauan (Depth Of Outreach) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) UED-SP Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *SEPA*, 14(1), 77–94.
- Saifullah, Hambali, R., Huda, N., Wise Liner, R., & Nuraini, P. (2021). Analisa Kredit Macet Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(1), 56–69.
- Supeno, B. (2018). Analisis Pengaruh Modal Manusia, Modal Pelanggan, Modal Struktural terhadap Kinerja Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Pekanbaru. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 1(4), 445–461. <https://inobis.org/ojs/index.php/jurnal-inobis/article/view/50>
- Suryani, F. (2017). Sistem dan Prosedur Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada UED SP Desa Tanah Merah, Siak Hulu, Kampar. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 1(1), 83–94. <https://doi.org/10.31539/costing.v1i1.66>
- Umami, N. (2019). Peran Manajemen Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Batik Dalam Memajukan Sektor Kewirausahaan. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.29408/jpek.v3i1.1387>
- Yuwono, W. (2020). Praktek Manajemen Keuangan:Sebuah Analisis Survei Pada UMKM Di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ecoment Global*, 5(2), 117–130.
- Zebua, F. Z., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Orahili Tumori Evaluation Of The emplementation of the village Financial Management System (Siskeudes) In Orahili Tumori Village. *Jurnal EMBA*, 10(4), 1410–1416.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau dengan Nomor Kontrak: 1408/UN19.5.1.3/PT.01.03/2022 bersumber dari Dana DIPA Universitas Riau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Pekanbaru atas kerjasama selama penelitian ini dilaksanakan.